



LUNCURKAN PETA KERAWANAN PILKADA KOTA YOGYA 2024

## Bawaslu Antisipasi Sepuluh Potensi Persoalan

YOGYA (KR) - Bawaslu Kota/Yogya bakal mengantisipasi sepuluh persoalan yang bisa berpotensi terjadi dalam ajang Pilkada Kota Yogya 2024. Hal itu berkaca dari pengalaman Pemilu 2024 yang sudah berlangsung sebelumnya.

Ketua Bawaslu Kota Yogya Andie Kartala, mengungkapkan peta kerawanan Pilkada Kota Yogya 2024 sudah berhasil diuraikan dengan mendasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). "Hasilnya kurang lebih ada sepuluh poin yang tersebar sejak dari tahapan pemutakhiran data hingga penetapan hasil penghitungan suara. Itu semua perlu kami antisipasi karena berpotensi terjadi kerawanan dalam pemilihan," ungkapnya, Minggu (7/7).

Beberapa potensi kerawanan tersebut misalnya pada tahapan pemutakhiran

data pemilih ialah warga yang telah memenuhi persyaratan namun tidak masuk dalam daftar pemilih. Pada Pemilu 2024 lalu hal itu pernah terjadi dan ditemukan di lima kemantren yakni Wirobrajan, Jetis, Gondokusuman, Gondomanan dan Gedongtengen. Kemudian pada tahapan kampanye setidaknya ada tiga potensi persoalan yakni pelanggaran lokasi kampanye seperti pernah terjadi di Wirobrajan lantaran berkampanye di tempat ibadah. Selanjutnya intimidasi terhadap penyelenggara pemilu karena pernah terjadi di Gondokusuman dan Wirobrajan. Terakhir berupa politik uang saat kampanye seperti yang terjadi di Kotagede oleh tim sukses calon.

Andie menambahkan, pada tahapan pemungutan suara jajarannya bahkan memetakan empat potensi

kerawanan. Diawali dengan distribusi logistik berupa surat suara yang tertukar, komplain dari saksi di TPS saat proses pemungutan atau penghitungan suara, pencoblosan oleh pemilih yang tidak berhak, serta potensi pemungutan suara ulang di sejumlah TPS. "Pada tahapan pemungutan suara sebenarnya lebih berkaitan dalam proses pengadministrasian. Agar jangan sampai terjadi kesalahan maka pema-haman KPSP atas regulasi serta tingkat kecermatannya sangat dibutuhkan. Kami pun nantinya tetap akan menerjunkan Pengawas TPS di tiap wilayah," tandasnya.

Sedangkan pada tahapan terakhir yakni penghitungan dan penetapan hasil juga tidak kalah pelik untuk di-antisipasi supaya tidak terjadi pelanggaran. Hal ini karena pada Pemilu 2024 sempat terjadi gugatan yang di-

layangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meski akhirnya gugatan itu kandas, namun penetapan hasil

pemilu di Kota Yogya otomatis harus mundur menyesuaikan hasil putusan MK. Di samping itu proses pen-

catatan juga harus diperhatikan karena di Wirobrajan sempat harus dilakukan perhitungan ulang karena ada

perbedaan data pengguna hak pilih di penghitungan surat suara sah dan tidak sah. (Dhi-f)

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005